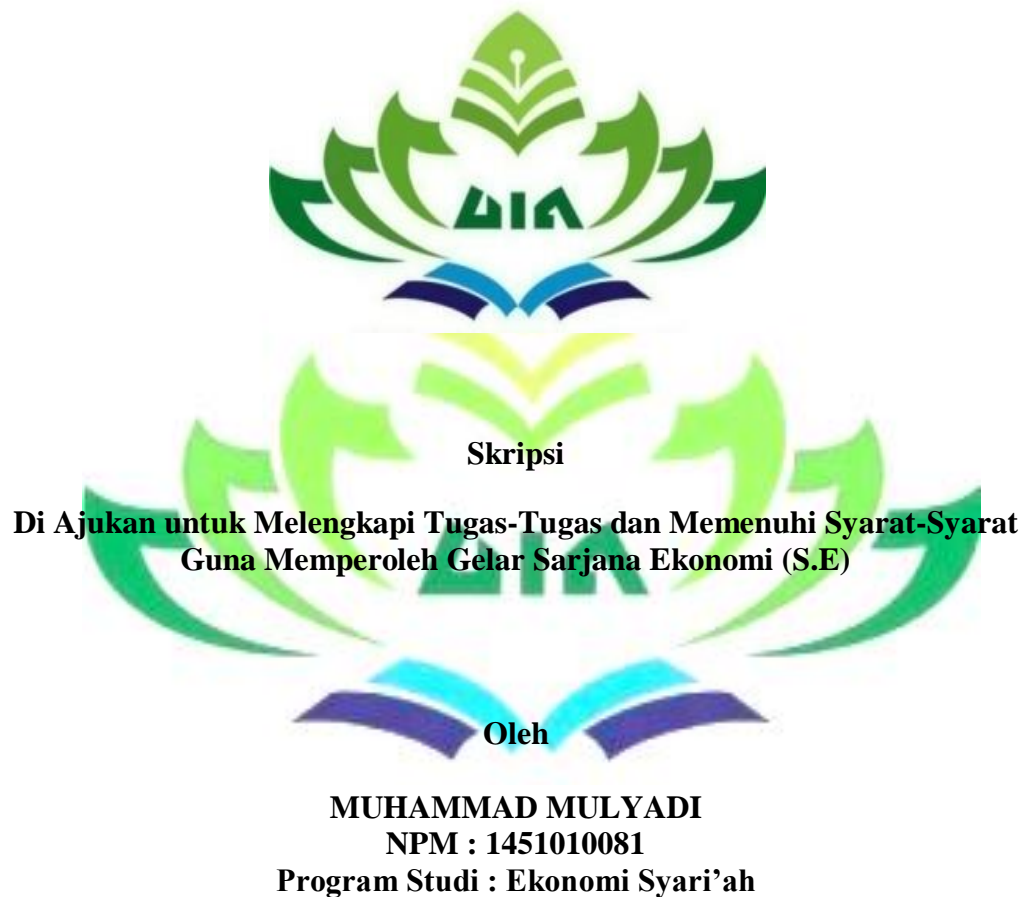


**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH  
TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI TINJAU DARI  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Komparasi Pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung )**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H /2018 M**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH  
TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI TINJAU DARI  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Komparasi Pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung )**

**Skripsi**

**Di Ajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



**Oleh**

**MUHAMMAD MULYADI  
NPM : 1451010081  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing I : Drs. H. Nasruddin, M.Ag  
Pembimbing II : M. Kurniawan, S.E.,M.E.Sy.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H /2018 M**

## ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi tercermin dari produk domestik regional bruto (PDRB) semakin besar output yang dihasilkan oleh PDRB maka semakin meningkat persentase pertumbuhan ekonomi. Pendapatan daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun merupakan tujuan suatu daerah, dengan adanya peningkatan maka ekonomi suatu daerah tersebut akan mengalami kemajuan. Disparitas pendapatan yang rendah merupakan tujuan semua negara, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta peningkatan produksi yang dihasilkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah terhadap disparitas pendapatan pada kota Metro dan kota Bandar Lampung tahun 2006-2016 ? b) Bagaimana disparitas pendapatan di tinjau dari perspektif ekonomi islam ?

Peneliti menggunakan metode kuantitatif, bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Sumber data diambil dari data data sekunder. Untuk analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan program Eviews 9.

Hasil penelitian ini diperoleh: a). Hasil uji Regresi Linear berganda pada kota Metro dan kota Bandar Lampung pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan dengan uji simultan. Pada kota metro uji parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan, sedangkan pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan. Pada kota Bandar Lampung uji parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, sedangkan pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan. b) Dengan adanya pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakat, infaq dan shadaqah maka diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan. Zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan shadaqah dan infaq bisa kapan saja dikeluarkan

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah dan Disparitas Pendapatan





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM.**  
**(Studi komparasi Pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Muhammad Mulyadi**

**NPM : 1451010081**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Drs. H. Nasruddin, M.Ag**  
**NIP. 19580924199003**

**Pembimbing II**

**M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy**  
**NIP. 198605172015031005**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Madnasir, S.E., M.Si**  
**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. (Studi komparasi Pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung). Disusun oleh : **Muhammad Mulyadi, NPM: 1451010081**, Program Studi : **Ekonomi Syaria’ah**, Telah Diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : **Senin, 12 November 2018**.

**TIM MUNAQSAH**

**Ketua Sidang**

**: Ahmad Habibi, S.E., M.E**

(.....)

**Sekretaris Sidang**

**: Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I**

(.....)

**Penguji I**

**: Muhammad Iqbal, S.E.I., M.E.I**

(.....)

**Penguji II**

**: Drs. H. Nasruddin, M.Ag**

(.....)

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag**  
**NIP.195808241989031003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmun, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama Mahasiswa** : Muhammad Mulyadi  
**NPM** : 1451010081  
**Jurusan** : Ekonomi Syari'ah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam. ( Studi Komparasi Pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung )"** adalah benar-benar merupakan skripsi hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasikan atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalm karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Desember 2018  
Penyusun



**Muhammad Mulyadi**  
**NPM. 1451010081**

## MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah ayat 105).



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku, Bapak A.Kory dan Ibu Mirna, yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan do'anya. Memberikan dukungan baik materi maupun non-materi. Selalu memberikan motivasi dikala diri ini menghadapi masalah dan rintangan. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT diberi kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkahnya.**
- 2. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga makin jaya dan dapat dibanggakan.**



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Muhammad Mulyadi, dilahirkan di Kota Bandar - Lampung pada tanggal 21 Juli 1996. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan bapak A.Kory dan Ibu Mirna.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah :

- 1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Halim Permai lulus tahun 2008.**
- 2. SLTP yaitu pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Surya Dharma 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2011.**
- 3. SLTA yaitu pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014.**

Kemudian penulis masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yaitu pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada jurusan Ekonomi Syari'ah melalui jalur undangan (SPAN-PTKIN) pada tahun 2014.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melipatkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan Di Tinjau dari Prespektif Ekonomi Islam ( Studi komparasi pada kota Metro dan Kota Bandar Lampung tahun 2006-2016 ) dengan baik dan benar. Sholawat beriring salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, tabiin, serta pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan bisnis islam Uin Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E) atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya, berikut ini penulis secara rinci mengungkapkan terima kasih kepada:

- 1. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran wakil dekan 1, 2 dan 3 yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.**

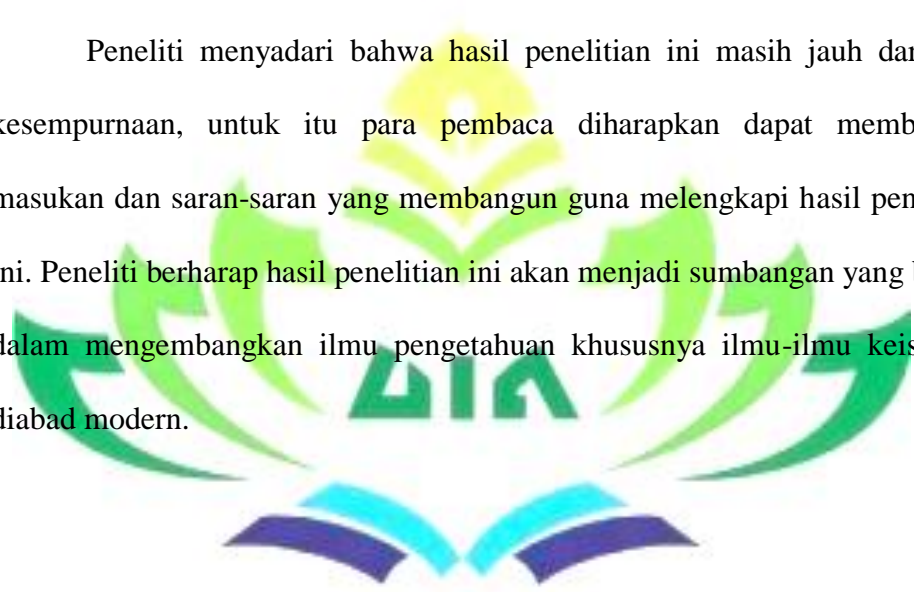


2. **Madnasir S.E., M.Si sebagai ketua jurusan/priodi Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.**
3. **Drs. H. Nasrudin, M.,Ag selaku pembimbing I Yang telah tulus meluangkan waktu untuk membimbing dan selalu sabar mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.**
4. **M. Kurniawan S.E.,M.E.,Sy selaku pembimbing II Yang telah tulus meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapatterselesaikan dengan baik dan benar.**
5. **Seluruh dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pembelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.**
6. **Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan informasi serta sumber referensi kepada penulis.**
7. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi dan Kota Bandar Lampung, yang memberikan izin untuk melakukan penelitian diwilayah Kota Bandar Lampung.**
8. **Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan penjelasan.**

9. Teman-teman kelas C Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, teman-teman organisasi yang memberikan pengalaman dan pelajaran, mitra dalam transaksi ide dan pikiran.

10. Lilis Istiqomah, Revy Dasari, dan Ari Yanto terimakasih atas bantuannya dalam proses penyelsaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu para pembaca diharapkan dapat memberikan masukan dan saran-saran yang membangun guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman diabad modern.



Bandar lampung , Desember 2018

Penulis

**Muhammad Mulyadi**  
**NPM.1451010081**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
<b>BAB II. LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Konsep Pertumbuhan Ekonomi .....	14
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi.....	15
3. Model Pertumbuhan Ekonomi Wilayah .....	18
4. Faktor Pertumbuhan Ekonomi .....	21
B. Pertumbuhan ekonomi dalam islam .....	22

C. Konsep Pendapatan Daerah .....	26
D. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah .....	27
1. Instrumen pendapatan asli daerah .....	27
2. Instrumen Dana Perimbangan .....	31
E. Pendapatan Daerah dalam islam .....	34
F. Konsep Disparitas Pendapatan .....	38
1. Pengertian Disparitas Pendapatan . .....	38
2. Penyebab ketimpangan antar wilayah .....	39
3. Penanggulangan ketimpangan .....	42
4. Mengukur ketimpangan .....	45
5. Ketimpangan menurut islam .....	49
G. Tinjauan pusataka .....	53
H. Kerangka Penelitian .....	55
I. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis .....	56

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	59
B. Sumber Data .....	60
C. Teknik Pengumpulan Data .....	60
D. Populasi dan Sampel .....	60
E. Variabel Penelitian .....	61
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	63

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
1. Kota Metro .....	68
2. Kota Bandar Lampung .....	70
B. Gambaran Hasil Penelitian .....	72
1. Pertumbuhan Ekonomi .....	73



2. Penerimaan Pajak .....	74
3. Disparitas Pendapatan .....	75
C. Analisis Data .....	75
1. Uji Asumsi Klasik Kota Metro .....	76
2. Analisis Regresi Linear Berganda kota Metro .....	78
3. Uji Asumsi Klasik Kota Bandar Lampung .....	80
4. Analisis Regresi Linear Berganda Kota Bandar Lampung .....	82
D. Pembahasan .....	85
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Penerimaan Pajak Terhadap Disparitas Pendapatan .....	85
2. Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Pajak Terhadap Disparitas Pendapatan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.....	89
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. PDRB Provinsi Lampung .....	7
2. Definisi Operasional Variabel .....	62
3. Pertumbuhan Ekonomi Kota .....	73
4. Uji Normalitas Kota Metro .....	76
5. Uji Multikolinearitas .....	76
6. Uji Autokorelasi .....	77
7. Uji Heterokedastisitas .....	77
8. Uji Regresi Linear Berganda .....	78
9. Uji Normalitas Kota Bandar Lampung .....	80
10. Uji Multikolinearitas .....	81
11. Uji Autokorelasi .....	81
12. Uji Heterokedastisitas .....	82
13. Uji Regresi Linear Berganda .....	82
14. Pendapatan Perkapita Kota Metro dan Kota B.Lampung .....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kurva Lorenz .....	46
2. Indeks Gini.....	49
3. Kerangka Fikir .....	56





## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b>	<b>Hasil Output Uji Asumsi Klasik</b>
<b>Lampiran 2</b>	<b>Berita Acara Seminar Proposal</b>
<b>Lampiran 3</b>	<b>Berita Acara Munaqasyah</b>
<b>Lampiran 4</b>	<b>SK Pembimbing</b>
<b>Lampiran 5</b>	<b>Blanko Konsultasi</b>
<b>Lampiran 6</b>	<b>Surat Permohonan Riset</b>
<b>Lampiran 7</b>	<b>Surat Riset KESBANGPOL Provinsi Lampung</b>
<b>Lampiran 8</b>	<b>Surat Riset KESBANGPOL Kota Lampung</b>
<b>Lampiran 9</b>	<b>Surat Riset BPPRD (Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi-Daerah)</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan daerah terhadap disparitas Pendapatan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”** Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat memahami skripsi ini dengan baik. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang ada didalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.<sup>1</sup>
2. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah juga merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat

---

<sup>1</sup> Robinson Tarigan, *ekonomi regional* (Jakarta: Bumi aksara,2014) h.46.

dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.<sup>2</sup>

3. Disparitas pendapatan menurut Sjafrizal adalah fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Disparitas/Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, akibatnya kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan menjadi berbeda. Tidak heran setiap daerah terdapat wilayah yang relatif maju (*developed region*) dan wilayah relatif (*underdeveloped region*)<sup>3</sup>.

uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dalam judul proposal ini yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah terhadap disparitas pendapatan di tinjau dari perspektif ekonomi islam yang khusus memfokuskan kepada kota-kota yang ada pada provinsi lampung yaitu kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun dipilihnya judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Phaureula, Emy, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h.9.

<sup>3</sup> Sjafrizal, *Ekonomi wilayah dan perkotaan* (Padang: Raja Gafindo, 2012), h.107.



## 1. Secara Objektif

Kita ketahui bahwa tidak dipungkiri bahwa disparitas/ketimpangan terjadi dinegara yang masih berkembang seperti pada Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan pada kota yang ada pada Provinsi Lampung, yaitu kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh positif terhadap Pendapatan Daerah, dengan adanya Pendapatan Daerah maka roda pemerintahan akan berjalan dengan baik dan dari hasil Pendapatan daerah dapat mampu membangun infrastruktur disuatu wilayah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dengan adanya mobilitas yang baik. Penulis tertarik mengkaji serta meneliti bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Pendapatan Daerah apakah berdampak positif atau negatif dan bagaimana pula hubungan dalam prespektif ekonomi islam.

## 2. Secara Subjektif

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan serta di dukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan. Disamping itu, penelitian yang penulis lakukan ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### C. Latar Belakang Masalah

Besarnya sumber daya yang ada pada suatu daerah baik sumber alam maupun sumber daya manusia, membuat suatu daerah ingin memajukan daerahnya dengan cara mengatur wilayahnya dengan otonomi daerah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan angin segar bagi daerah untuk memaksimalkan daerahnya masing-masing. Otonomi daerah menunjukkan bahwa makna dasar dari otonomi adalah adanya suatu kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan sendiri yang ditujukan bagi pelaksanaan roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara<sup>4</sup>.

Pembangunan suatu daerah yang pesat pastilah dilihat dari kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa di lihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan

---

<sup>4</sup> Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa". *Jurnal Politik Profetik*, Volume.1 Nomor .1 (Tahun 2013).

pembangunan daerahnya. Hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang di miliknya, kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.<sup>6</sup>

Adam Smith mengatakan bahwa sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (*stationary*

---

<sup>5</sup> Deny Iswanto, "Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur". *Jurnal Al-Kahfi*, Vol.4 No.1 (April 2015).

<sup>6</sup> Himawan Yudistira, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume. 16 No. 03 (Tahun 2016).



state).<sup>7</sup> Namun hal ini berbeda dengan realita yang terjadi pada Kota Metro pengangguran berjumlah 3.100 jiwa pada tahun 2016, dengan tahun yang sama pengangguran pada Kota Bandar Lampung berjumlah 43.200 jiwa. Pada kota Metro dan Kota Bandar Lampung tidak terjadi *full employment* atau tingkat tenaga kerja penuh, dengan semakin besar nya PDRB maka seharusnya jumlah pengangguran akan menurun.

Pendapatan yang tinggi pada suatu daerah memungkinkan suatu daerah memiliki anggaran lebih besar dan juga dapat dioptimalkan demi kemajuan daerah tersebut. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, semakin besar output yang di hasilkan suatu daerah semakin besar pendapatan daerah tersebut. PDRB merupakan indikator dari di hasilkan dari suatu daerah.

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan daerahnya masih belum signifikan. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi

---

<sup>7</sup> Kristovel Prok, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Selama Periode Otonomi Daerah 2001-2013". *Jurnal Berkala Ilmiah FEB Universitas Sam Ratulangi Manado Efisiensi*, Volume. 15 No. 03 (Tahun 2015 ).

pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.<sup>8</sup>

Berikut merupakan PDRB yang ada pada Provinsi Lampung :

Tabel 1  
PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan  
Dalam Juta Rupiah (2011-2013)

No	Kabupaten / Kota	2011	2012	2013
1	Lampung Barat	1.578.014	1.135.729	1.194.321
2	Tanggamus	2.504.579	2.683.250	2.899.977
3	Lampung Selatan	4.615.643	4.906.387	5.201.169
4	Lampung Timur	4.572.452	4.816.469	5.058.414
5	Lampung Tengah	6.587.165	7.006.637	7.435.788
6	Lampung Utara	3.566.685	3.781.781	3.997.559
7	Way Kanan	1.486.211	1.570.204	1.654.983
8	Tulang Bawang	2.384.794	2.504.381	2.636.819
9	Pesawaran	1.773.600	1.887.627	1.994.969
10	Pringsewu	1.439.875	1.536.405	1.631.923
11	Mesuji	1.315.210	1.399.313	1.485.680
12	Tulang Bawang Barat	1.193.901	1.272.176	1.343.765
13	Pesisir Barat	-	547. 164	570. 948
14	Bandar Lampung	6.967.851	7.423.369	7.905.567
15	Metro	598. 519	634. 711	674. 271

Sumber : Badan Pusat statistik, diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB pada kabupaten/kota yang ada pada provinsi lampung. PDRB terendah pada tahun 2013 adalah kabupaten pesisir barat, dengan jumlah Rp.570.948.000.000,- ini menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan pada kabupaten pesisir barat masih rendah ini dikarenakan bahwa kabupaten pesisir barat baru dalam tahap pemekaran wilayah pada tahun

---

<sup>8</sup>Masayu, Catur Martian, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung". *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol.1 No.1 (2017).

tersebut. PDRB tertinggi pada 2013 adalah Kota Bandar Lampung, dengan jumlah Rp. 7.905.567.000.000 ini menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan pada kota Bandar Lampung cukup besar. Kota Bandar Lampung tidak dipungkiri bahwa merupakan Ibu kota Provinsi Lampung dan pusat-pusat perekonomian. Perkembangan ekonomi pada provinsi Lampung ditunjukkan dari melalui nilai PDRB dari tahun ke tahun. PDRB menggambarkan produktifitas dari suatu daerah dalam melakukan kegiatan ekonomi. PDRB dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada, semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan maka semakin besar pula pendapatan daerah yang dihasilkan.

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus

---

<sup>9</sup> Kainde, "Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung, Christian". *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 (2013).



memperhatikan sejauh mana pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya.

Pada instrumen Produk Domestik Regional bruto berupa lapangan usaha yang terdapat didalamnya pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung antara lain pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, pengadaan listrik gas, pengadaan air, konstruksi, pedagang besar eceran, transportasi pergudangan, penyediaan akomodasi, informasi, komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Kota Metro pada tahun 2011 menunjukkan jumlah dari Produk Domestik Regional bruto sebesar Rp.598.519.000.000,- dan tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan seperti pada tahun 2013 sebesar Rp.674.271.000.000,- ini mengindikasikan bahwa setiap tahun dalam kota metro mengalami kenaikan output yang dihasilkan, dengan semakin banyak output yang dihasilkan semakin bertambah pula peningkatan pendapatan daerahnya. Pada Produk Domestik Regional bruto kota Metro yang paling banyak menyumbang nominal dari lapangan usaha yaitu pada pedagang besar eceran.

Kota Bandar Lampung jumlah Produk Domestik Regional bruto pada tahun 2011 sebesar Rp.6.967.851.000.000 terus mengalami peningkatan dari tahun demi tahun seperti pada tahun 2013 sebesar Rp.7.905.567.000.000 ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun per tahunnya. Output yang dihasilkan bertambah maka semakin bertambah pula peningkatan pendapatan daerahnya. Pada kota Bandar

lampung penyumbang terbesar dari instrumen lapangan usaha yaitu pada industri pengolahan. Kesimpulannya bahwa kota Bandar Lampung lebih unggul dalam jumlah Produk domestik regional bruto dari pada kota Metro, semakin besar nilai Produk domestik regional bruto maka semakin besar pendapatan daerah yang di dapat.

Keragaman potensi sumber penerimaan daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penerimaan Pendapatan daerah. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya.<sup>10</sup>

Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah.<sup>11</sup> Menurut Sukirno Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk antar daerah dan antar sektor. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan tingkat ketimpangan pendapatan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hasan Basri, Syaparuddin, Junaidi, "Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol.1 No.2 (Oktober 2013).

<sup>11</sup> Sjafrizal. *Op.cit* h.107.

<sup>12</sup> Aidar Ramadhan, "Analisis Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh". Volume 2 Nomor 1 ( Mei 2015).

Kuznet menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan dengan kesenjangan seperti *U-shaped* terbalik, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi positif, namun dalam jangka panjang hubungan tersebut menjadi negatif. Artinya dalam tahap awal pembangunan tingkat ketimpangan akan semakin besar sampai pada tingkat tertentu dan selanjutnya tingkat ketimpangan itu akan semakin menurun.<sup>13</sup> Namun pada kenyataannya pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang tidak dibarengi dengan menurunnya ketimpangan pendapatan dilihat dari indeks gini bahwa ketimpangan pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh dan dibarengi dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Indeks gini dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto dengan jumlah populasi suatu daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terlalu berlebihan maka disparitas pendapatan akan menurun.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan bahwa Pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung mengalami ketimpangan pada kondisi ketimpangan sedang. Produk domestik regional bruto menjadi indikator indeks gini, semakin besar PDRB suatu daerah dengan diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang tidak berlebihan maka ketimpangan akan dapat menurun. Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti bermaksud untuk menganalisis ***Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan***

---

<sup>13</sup> Todaro Michael, *Pembangunan Ekonomi* ( Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2011), h.277.

***Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan ditinjau dari Prespektif  
Ekonomi Islam Pada Kota Metro Dan Kota Bandar Lampung.***

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Daerah terhadap disparitas pendapatan pada kota Metro dan kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana disparitas pendapatan di tinjau dari perspektif ekonomi islam ?

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan daerah terhadap disparitas pendapatan pada kota Metro dan kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui disparitas pendapatan di tinjau perspektif ekonomi islam.

**2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk penulis : penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang kini penulis sedang tempuh.



- b. Untuk akademisi : penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan mengenai pertumbuhan ekonomi, Pendapatan daerah dan juga disparitas pendapatan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Pertumbuhan Ekonomi**

##### **1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.<sup>14</sup> Menurut Boediono pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka panjang dan pertumbuhan itu haruslah bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Jadi Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah.<sup>15</sup>

Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan peningkatan output yang dihasilkan suatu daerah secara berkala, dari waktu

---

<sup>14</sup> Adearman Putra, "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun". (Tesis Program Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006), h.8.

<sup>15</sup> Robinson Tarigan *Op. Cit.* H.46

kewaktu, memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejateraan masyarakat diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional.

## 2. Teori – Teori Pertumbuhan Ekonomi

### a. Teori Ekonomi Klasik

Kaum klasik mengemukakan teori mengenai pertumbuhan ekonomi antara lain perekonomian dalam keadaan *full employment*, perekonomian terdiri atas dua sektor yaitu konsumen dan produsen, tidak ada campur tangan pemerintah. Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*.

Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (*stationary state*).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kristovel Prok, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Selama Periode Otonomi Daerah 2001-2013”. *Jurnal Berkala Ilmiah FEB Universitas Sam Ratulangi Manado Efisiensi*, Volume. 15 No. 03 ( Tahun 2015 ).

### **b. Teori Harrod-Domar Dalam Sistem Regional**

Harrod – Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan yaitu antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran K untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh  $V$  (capital output ratio = Rasio modal - output), apabila tabungan dan investasi adalah sama  $S=I$ .

### **c. Teori Pertumbuhan Neoklasik**

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan TW. Swan (1956) dari Australia. Model Solow - Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi.<sup>17</sup>

Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dan peningkatan skill atau

---

<sup>17</sup> Robinson Tarigan, *Op. Cit.* h.46.



kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat. Model tersebut, masalah teknologi dianggap fungsi dari Waktu.<sup>18</sup>

d. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat Yang Disinergikan

Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Misalnya, usaha perkebunan yang dibuat bersinergi dengan usaha peternakan. Rumput/limbah perkebunan dapat dijadikan makanan ternak, sedangkan teletong/kotoran ternak bisa dijadikan pupuk untuk tanaman perkebunan. Dengan demikian, pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor yang lain, begitu juga sebaliknya. Selain itu, bahwa kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*enterpreneurship*) dalam masyarakat.<sup>19</sup>

e. Teori Basis Ekspor Richardson

Penganjur pertama teori ini adalah Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi/ jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan *service* (pelayanan). Ekspor tidak hanya mencakup barang/jasa yang dijual ke luar daerah tetapi termasuk juga di dalamnya barang atau jasa yang dibeli orang dari luar daerah walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah tersebut. Kegiatan lokal yang melayani pariwisata adalah pekerjaan basis karena

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h.55.

<sup>19</sup> *Ibid.* h.56.

mendatangkan uang dari luar daerah. Demikian pula kegiatan lokal di perkotaan seperti restoran, bengkel, usaha grosir.<sup>20</sup>

### 3. Model Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa ada wilayah yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi dan ada pula yang sangat rendah. Berikut ini diuraikan ide pokok dan formulasi dari model pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut :

#### a. Model Basis Ekspor (*Export Base Model*)

Model ini mula-mula diperkenalkan oleh Douglas C. North . Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada dasarnya ditentukan oleh besarnya Keuntungan Kompetitif (*Competitive Advantage*) yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan. Bila suatu wilayah tertentu dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk kegiatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan akan meningkat cepat. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan ekspor tersebut akan memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) yang cukup besar bagi perekonomian daerah bersangkutan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h.56.

<sup>21</sup> Sjafrizal, *Op. Cit.* h.30.

b. Model *Interregional Income*

Perluasan dari Model Basis Ekspor dapat dilakukan dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah yang dikenal sebagai *Interregional Income* Modal yang dikembangkan oleh Harry W. Richardson pada tahun 1978. Ekspor diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem perekonomian daerah bersangkutan (*endogeneous variable*) yang fluktuasinya ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah. Selanjutnya, kegiatan perdagangan antar daerah tersebut dibagi atas barang konsumsi dan barang modal.<sup>22</sup>

c. *Shift-Share Analysis*

*Shift-share* digunakan untuk menjelaskan perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor secara nasional, regional dan lokal. Menurut arsyad analisis *shift-share* digunakan untuk menentukan kinerja perekonomian daerah. Analisis *shift-share* digunakan untuk melihat kecenderungan transformasi struktur perekonomian wilayah. Analisis ini mengasumsi bahwa pertumbuhan suatu wilayah dapat dibagi kedalam tiga komponen.

Pertama, komponen pertumbuhan ekonomi provinsi (*share regional*), untuk melihat posisi relatif suatu daerah dengan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. *Share regional* menggambarkan perubahan output suatu wilayah, komponen ini terjadi misalnya kriteria inflasi untuk kebijakan perpajakan. Kedua, pertumbuhan sektoral (*Proportionally*

---

<sup>22</sup> *Ibid.* h.95.

*Shift*), adalah untuk mengukur tingkat pertumbuhan produksi suatu wilayah lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional. *Proportionally shift* dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, dan kebijakan sektoral. Ketiga, pertumbuhan daya saing wilayah (*Different Shift*), adalah mengukur daya saing suatu wilayah dibandingkan wilayah lain. *Different shift* terjadi karena peningkatan atau penurunan output disebabkan keunggulan komparatif.<sup>23</sup>

d. Model Neo-klasik

Model ini dipelopori oleh George H. Bort dengan mendasarkan analisisnya pada teori ekonomi neo-klasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah.<sup>24</sup>

e. Model Kota dan Desa

Model Kota dan Desa adalah suatu bentuk teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang dipelopori oleh Gurnal Mirdal. Model ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh adanya sinergi yang kuat antara kegiatan ekonomi daerah pedesaan (*rural*) dengan kegiatan

---

<sup>23</sup> Zainal Abidin, "Aplikasi Analisis Shift Share Pada Transformasi Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Wilayah Disulawesi Tenggara". *Jurnal Informatika Pertanian Balai Pengkaji Teknologi*, Vol.24 No.2 (Desember 2015), h.165-178.

<sup>24</sup> Sjafrizal, *Op. Cit.* h.98.



daerah perkotaan (*urban*). Pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan akan dapat diwujudkan bilamana hasil produksi sektor pertanian di daerah pedesaan sebagian besar digunakan oleh kegiatan industri, perdagangan dan jasa pada daerah perkotaan terkait. Sedangkan hasil produksi daerah perkotaan sebagian besar dimanfaatkan oleh daerah pedesaan terkait. Keterkaitan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan tersebut akan dapat pula mendorong terwujudnya apa disebut oleh Mirdal sebagai Efek Rembesan (*Trickling-down Effect*).<sup>25</sup>

#### 4. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber manusia, modal, usaha, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi :

##### a. Sumber Alam

Sumber alam adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu daerah berupa tumbuh-tumbuhan dan berbagai jenis tanaman, dengan adanya

---

<sup>25</sup> Sjafrizal, *Op. Cit.* h.105.

kekayaan alam ini maka akan menjadi nilai tambah disuatu wilayah dan dapat dioptimalkan menjadi keunggulan wilayah tersebut.

b. Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah segala yang berkaitan dengan nilai dalam hal ini investasi, dengan investasi maka suatu wilayah akan meningkatkan outputnya dalam arti peningkatan produksi dan akan menyerap tenaga kerja ekonomipun menjadi membaik.

c. Organisasi

Organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama secara bersama-sama dengan adanya organisasi maka akan mensinergikan anatar satu organisasi dengan yang lain dan akan menghasilkan kemajuan.

d. Teknologi

Teknologi adalah penunjang dari yang biasanya dapat dilakukan oleh manusia menjadi dapat dilakukan oleh alat atau robot sehingga memudahkan pekerjaan manusia, dengan adanya teknologi maka peningkatan hasil produksi akan meningkat dan optimalisasi dari pertumbuhan ekonomi.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi.

Skala produksi adalah peningkatan jumlah kapasitas produksi suatu wilayah, suatu wilayah dikatakan unggul apabila memiliki produksi yang

mempuni dan berkualitas. Semakin banyak jumlah produksi maka semakin banyak output yang dihasilkan otomatis keuangan daerah meningkat.<sup>26</sup>

## **B. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam**

Pertumbuhan ekonomi menurut prespektif ekonomi islam, bukan sekedar terkait dengan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Faktor-faktor tersebut adalah :

### **1. Sumber daya yang dapat dikelola (*invisibile resources*)**

Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Sumber daya alam pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah dan disiapkan-Nya kepada manusia untuk kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai khalifah-Nya dimuka bumi, harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Islam berusaha supaya sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya agar bisa menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam memberikan petunjuk sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid.* h.106.

- a. Alquran dan Sunnah memberikan peringatan bahwa alam telah ditundukan untuk umat manusia sebagai salah satu sumber rezeki.
  - b. Manusia adalah khalifah Allah Swt yang bertugas untuk mengatur, memanfaatkan, dan memberdayakan alam dimuka bumi. Sedangkan pemilik yang hakiki adalah Allah Swt.
  - c. Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk kepentingan seseorang ataupun untuk orang banyak.
  - d. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memerhatikan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt yaitu menjaga, memelihara dan memakmurkannya bukan merusak alam yang mengakibatkan punahnya keaslian dan keindahan alam semesta.<sup>27</sup>
2. Sumber daya manusia (*human resources*) dan Wirausaha (*entrepreneurship*).

Manusialah yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Kedua kualitas ini harus dipenuhi dan

---

<sup>27</sup> A Dearman putra, *Op. Cit.* h.13.



tidak dapat berdiri sendiri.<sup>28</sup> Kombinasi keduanya mutlak dipadukan dalam batas-batas yang rasional.

Pertumbuhan ekonomi dalam islam disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an QS.

Hud ayat 61:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝ۙ﴾

Artinya : Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. shaleh berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-nya, kemudian bertobatlah kepada-nya, Sesungguhnya tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." QS. Hud ayat 61.

Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah Allah SWT kepada manusia untuk beribadah dan senantiasa tunduk pada Allah SWT. Tugas manusia adalah sebagai pemakmurkan bumi dengan cara berupa bercocok tanam, bertani dan segala pekerjaan yang berkaitan dengan memakmurkan bumi.

Pertumbuhan ekonomi akan membaik apabila adanya kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk kemakmuran bumi dan kemakmuran dirinya.

Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapasitas yang telah

---

<sup>28</sup> Almizan, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume.1 Nomor. 2 (Desember 2016).

disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia. Kemudian dilihat dari tujuan pokoknya, islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya dan tuntutan realisasi keadilan sosial. Islam mendorong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan sejumlah komoditas yang memang diperlukan dalam tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya.

### **C. Konsep Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah juga merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.<sup>29</sup> Kesimpulannya bahwa pendapatan daerah adalah pendapatan yang di terima dari perorangan atau instansi yang di ambil oleh pemerintah guna mendapatkan dana pendapatan, yang diantaranya dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

---

<sup>29</sup> Phaureula, Emy, *Op.Cit.* h.9.

Pasal 157 undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari pertama, Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa hibah, dana darurat, dana bagi hasil provinsi, bantuan keuangan provinsi, dana penyesuaian otonomi khusus dan penerimaan lain-lain.<sup>30</sup>

#### **D. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah**

##### **1. Instrumen Pendapatan Asli Daerah**

PAD merupakan pendapatan yang di peroleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Definisi lain dari PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang di pisahkan. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 10.

berlaku.<sup>31</sup> Dalam pendapatan asli daerah terdapat uraian yaitu berupa pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>32</sup> Kesimpulannya bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah pajak yang dihasilkan dari daerah dan dikelola untuk daerah guna memenuhi dan menjalankan rumah tangga daerah tersebut, berikut objek pajak daerah :

- 1) Pajak air permukaan
- 2) Pajak hotel
- 3) Pajak restoran
- 4) Pajak hiburan

---

<sup>31</sup>Carunia, Mulya, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h.19.

<sup>32</sup>Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi 2018*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2018), h.1.

- 5) Pajak reklame
- 6) Pajak penerangan jalan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak PBB perkotaan dan pedesaan
- 9) Pajak BPHTB.<sup>33</sup>

b. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengertian Jasa sendiri adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<sup>34</sup> Garis besarnya bahwa bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain jika pajak tidak mendapat manfaat secara langsung maka retribusi mendapatkan manfaat secara langsung.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penerimaan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yaitu hasil penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas

---

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 48.

<sup>34</sup> Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.45.



penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat misalnya antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro).<sup>35</sup> Garis besarnya bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah keuntungan yang di dapatkan dari sektor-sektor yang ada pada daerah tersebut dan juga menjadi keuntungan atau pendapatan daerah tersebut.

d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, misalnya didapatkan dari sumber berikut : Hasil penjualan barang milik daerah, Jasa giro, Sumbangan pihak ketiga, Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah, pendapatan denda pajak.<sup>36</sup> pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

<sup>36</sup>Aries Djainuri, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah* (Bogor : Gailia Indonesia, 2012), h.74.

<sup>37</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.99.

## 2. Instrumen Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat di era otonomi daerah.<sup>38</sup>

### a. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar, celah fiskal dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, kapasitas fiskal merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah dengan dana bagi hasil yang diperoleh. Sementara alokasi dasar merupakan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.<sup>39</sup> Dana alokasi umum meliputi sejumlah dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap daerah Otonom

---

<sup>38</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.77.

<sup>39</sup>Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1.

(Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

b. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN & di alokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.<sup>40</sup>

DAK memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya di mana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK. DAK dapat dikategorikan sebagai *matching grant* karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus *restricted grant* karena

---

<sup>40</sup>Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1.

karakternya sebagai *categorical grant-in-aid*.<sup>41</sup> Kesimpulannya Dana alokasi Khusus di transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana bagi hasil pajak dan Dana bagi hasil bukan pajak.<sup>42</sup>

Dana Bagi Hasil adalah bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana bagi hasil merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil. Dalam pasal 11 UU No. 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (DBHSDA). Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas: pajak bumi dan bangunan (PBB), bea

---

<sup>41</sup>Nurul Hidayah, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah". *Jurnal Akuntansi Mercu Buana Jakarta*, Vol. XVIII. No. 1 (Januari 2014).

<sup>42</sup>Sri Mulyati, "Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap belanja daerah Pada Provinsi Aceh". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 (September 2017).

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.<sup>43</sup> Jadi, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah tersebut.

#### **E. Pendapatan Daerah dalam islam**

Negara Islam (*al-Daulah al-Islamiyah*) terbentuk ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, dengan terbentuknya negara islam maka negara tersebut haruslah memiliki kestabilan dalam politik, sosial dan ekonomi. Setelah terciptanya stabilitas sosial ekonomi dan politik umat, baru kemudian Nabi Muhammad Saw menetapkan kebijakan keuangan negara melalui sumber pemasukan negara. Berikut pos penerimaan pendapatan dalam islam :

##### **1. Kharaj**

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan pada zaman Rasulullah SAW adalah kharaj, yaitu pajak terhadap tanah, yang di

---

<sup>43</sup>Chalid, Pheni, *Keuangan Daerah , Investasi dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan* (Jakarta : Kemitraan, 2005), h.30.



Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal yang membedakan kharaj dengan sistem PBB, yakni kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah bukan zoning. Kharaj ini di bayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik orang-orang Muslim maupun non-Muslim.<sup>44</sup> Hasil pengenaan kharaj di distribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslimin.<sup>45</sup> Kesimpulannya bahwa Kharaj adalah hasil tanah yang dikenakan atas orang muslim dan non muslim, di tetapkan dalam undang-undang syariah.

## 2. Zakat

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ibn Taimiyah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.” Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.<sup>46</sup> Dengan demikian bahwa zakat yang di bayarkan oleh muzaki (pembayar zakat) kepada pemerintah menjadi sumber pendapatan

---

<sup>44</sup>Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h.728.

<sup>45</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta : Raja Grafindo, 2007), h.27.

<sup>46</sup>M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.278.

pemerintah dan di salurkan kembali kepada muztahik (penerima zakat) yang masuk kedalam golongan penerima zakat.

### 3. Jizyah

Jizyah berasal dari kata jaza yang berarti kompensasi. Dalam terminologi keuangan islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-Muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada dinegara islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Disamping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial.<sup>47</sup> Dengan demikian jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim dinegara islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.

### 4. Fa'i

Fa'i secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu. Fa'i diperoleh dari barang yang dirampas dari orang-orang yang tidak beriman yang takluk tanpa peperangan. Fa'i merupakan sumber penerimaan dari negara islam dan sumber pembiayaan negara. Ringkasan fa'i diatur penggunaannya

---

<sup>47</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2007), h.29.

oleh Rasulullah SAW, sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memnuhi kebutuhan pangan masyarakat umum.<sup>48</sup>

## 5. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang didapatkan kaum muslimin dengan melakukan peperangan bisa berupa tawanan perang, peralatan perang, ataupun tanah kekuasaan. Harta Ghanimah dibagikan seperlimanya untuk Rasul, kemudian kepada orang yang ikut dalam peperangan, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.<sup>49</sup> Berikut ayat yang menjelaskan mengenai ghanimah dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 41 :

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَقَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, oransg-orang miskin dan ibnus sabil. Jka kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

## 6. Ushr

Ushr adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada pedagang yang melewati kawasan perdagangan islam, ditunjuk untuk

---

<sup>48</sup>Wahyu Wibisana, "Pendapat Ibnu Tamiyah Tentang Keuangan Publik". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.14 No.1 (2016).

<sup>49</sup> Saparuddin, "Skema Distribusi dalam Islam". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Human Falah*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2015).

meningkatkan perdagangan. Pembayar ushr adalah pedagang muslim dan non muslim dibebankan atas volume perdagangan. Biaya tarif ushr dipengaruhi oleh :

- a. Tarif yang dipungut patner dagang
- b. Besarnya jasa yng diberikan oleh pemerintah
- c. Kemampuan bayar.<sup>50</sup>

Kesimpulannya bahwa pendapatan negara dalam islam di antaranya adalah kharaj, zakat, jizyah, fa'i, ghanimah dan ushr. Dengan adanya pemasukan negara maka ulil amri akan menyalurkan pendapatan yang di dapat oleh negara kepada rakyatnya baik berupa bantuan langsung atau dalam bentuk fasilitas umum. Sumber pendapatan yang di dapat baik dari kaummuslim maupun non muslim.

## **F. Konsep Disparitas Pendapatan**

### **1. Pengertian Disparitas Pendapatan**

Disparitas pendapatan atau yang sering di kenal dengan ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights*.

---

<sup>50</sup>Ahmad Munir Hamid, "Peran Baitul Mal dalam Kebijakan Keuangan Publik". *Jurnal Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Darul Ulum*, Vol. 1 No.1 (Januari 2018).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres. Sedangkan, pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu.<sup>51</sup>

## 2. Penyebab Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah

Adanya analisis ini, akan dapat dijelaskan secara empirik unsur penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi wilayah tersebut. Berikut penyebab ketimpangan ekonomi antar wilayah :

### a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan ekonomi antarwilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Ada daerah mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tapi daerah lain tidak ada. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah

---

<sup>51</sup> Benu Olfie L. Suzana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Utara". *Jurnal Vredrich Bantika* Vol.1 No.2.



dibandingkan dengan daerah lain Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antardaerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan di sini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini kemudian akan dapat pula memengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah, karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan.<sup>52</sup>

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. daerah tidak akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat

---

<sup>52</sup> Sjafrizal, *Op.Cit.* h.119.

membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan ekonomi antar wilayah akan cenderung lebih tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong kegiatan ekonominya, dan komunikasi dan masih terdapatnya beberapa daerah yang terisolir.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah di mana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antarwilayah

Daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang

lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah tertentu ternyata lebih rendah, sehingga kegiatan ekonomi dan pembangunan daerahnya kurang berkembang baik. Kondisi ini menyebabkan daerah perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dari daerah pedesaan.<sup>53</sup>

### **3. Penanggulangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah**

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi antar wilayah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukannya, yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah dalam suatu negara atau wilayah.<sup>54</sup>

#### **a. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan**

Kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut adalah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah. Upaya untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana perhubungan ke seluruh pelosok Wilayah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan di sini

---

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 122 et seq.

<sup>54</sup> *Ibid.* h. 124

adalah fasilitas jalan, terminal, telekomunikasi dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antardaerah.

b. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan ekonomi daerah bersangkutan akan dapat pula digerakkan. Pertama, program transmigrasi ini dilakukan untuk dapat mengurangi kepadatan penduduk yang terdapat di pulau Jawa yang telah memicu peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Kedua, program transmigrasi tersebut juga dilakukan dalam rangka mendorong proses pembangunan ekonomi di daerah terbelakang yang menjadi tujuan transmigrasi, sehingga lahan yang luas tetapi belum dapat dimanfaatkan karena keterbatasan tenaga kerja akan dapat diatasi.<sup>55</sup>

c. Pengembangan Pendidikan Antar wilayah

Alasannya jelas karena pengembangan pendidikan akan dapat mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tekanan pembangunan sebaiknya diberikan pada pengembang pendidikan dasar dan

---

<sup>55</sup>*Ibid.* h. 125

menengah, dan pendidikan kejuruan yang merupakan kebutuhan umum dan diperkirakan akan dapat memberikan pengaruh cukup besar terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja antarwilayah.

d. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan masih terus mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha tersebut. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat dikurangi. Dengan demikian, kota-kota skala kecil dan menengah akan berkembang sehingga kegiatan pembangunan ekonomi dapat lebih disebarakan ke pelosok daerah.<sup>56</sup>

e. Pelaksanaan otonomi daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah, termasuk daerah

---

<sup>56</sup> *Ibid.* h. 126



terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena adanya wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi.

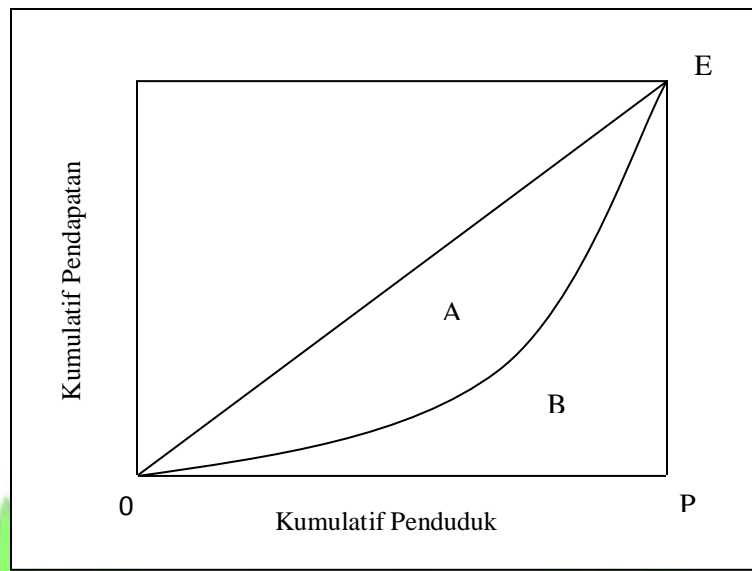
#### **4. Mengukur Ketimpangan**

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi yang dimaksud, berikut cara mengukur ketimpangan:

##### **a. Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan

sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut.<sup>57</sup>



Gambar 1  
Kurva Lorenz dan indeks Gini

Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

#### b. Indeks Gini

Gini atau lengkapnya Corrado Gini merumuskan suatu ukuran untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan personal secara

<sup>57</sup> Todaro Michael, *Op.Cit.* h.255.

agregatif yang diterima di atas tingkat tertentu. Hasil temuannya sering disebut sebagai *gini coefficient* atau indeks gini. Koefisien gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, yang menjelaskan kadar pemerataan pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya koefisien yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang.

Angka rasio Gini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga OBC. Semakin melengkung kurva Lorenz, akan semakin luas yang dibagi rasio Gini-nya akan semakin besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang semakin timpang. Ukuran ketidaksamaan digunakan untuk menggunakan ukuran ini diperkenalkan oleh Williamson (1965) perhitungan nilai ini didasarkan pada variasi indeks memodifikasi perhitungan ini untuk menimbang proporsi penduduk wilayah tersebut. Berbeda dengan indeks Gini yang menghitung nilai dari seluruh distribusi pendapatan rumah tangga di suatu wilayah atau negara, indeks Williamson dapat melihat besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah dalam suatu wilayah. Semakin besar angka

indeks Williamson, semakin besar derajat ketidaksetaraan.<sup>58</sup> Indeks ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$IW = \frac{\sqrt{(\mathbf{Y}_i - \hat{\mathbf{Y}}) \frac{f_i}{n}}}{\hat{\mathbf{Y}}}$$

Di mana:

IW: Indeks kesenjangan pendapatan

$f_i$ : Total populasi setiap provinsi  $i$

$n$ : Jumlah populasi nasional

$Y_i$ : PDB masing-masing provinsi  $i$

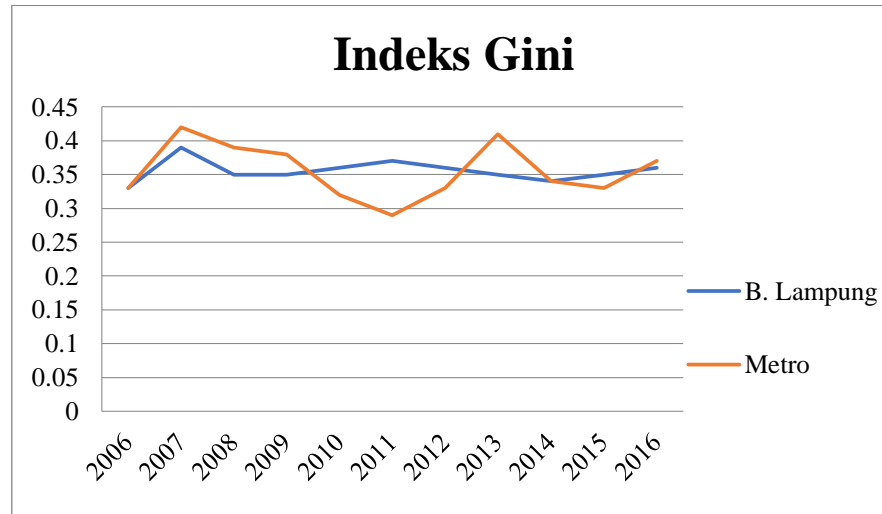
$\hat{Y}$ : Rata-rata PDB<sup>59</sup>

Berikut data ketimpangan berupa indeks gini pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung :

---

<sup>58</sup> Sabirs, "Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan". (Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang 2015), h.40.

<sup>59</sup> Tulus suryanto et. al. "Tax Revenue and Disparity: How to Improvement Income Inequality in Islamic Perspective". *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, Vol. 5 No. 2 (2018), h.65-71.



Gambar 1  
Indeks Gini Kota Metro dan  
Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2016

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat bahwa naik turunnya nilai dari indeks gini rata-rata dari data diatas menunjukkan ketimpangan sedang. Koefisien gini sebesar 0 berarti terdapat pemerataan sempurna. kriteria ketimpangan,  $GR < 0,3$ : ketimpangan rendah,  $GR 0,3-0,4$  : ketimpangan sedang,  $GR > 0,4$  : ketimpangan tinggi. Pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung rata-rata indeks gini dalam kategori ketimpangan sedang.

## 5. Ketimpangan Menurut Ekonomi Islam

Merespon tantangan ketidakadilan dan ketimpangan distribusi tersebut, maka Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai



keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distributif. Dengan adanya pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakat dan shadaqoh, maka diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan antara "the have" dan "the have not".<sup>60</sup> Salah satu ayat yang menjelaskan bahwa harta tidak boleh menumpuk pada segolongan orang saja yaitu Q.S Al-Hasyr ayat 7, berikut :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka

---

<sup>60</sup> Anita Rahmawaty, "Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributive". Volume 1 No.1 (Juni 2013).

tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya ( Al-Hasyr ayat 7 ).

Ayat di atas berbicara mengenai harta itu terdistribusi haruslah dengan distribusi yang adil maksudnya adalah bahwa harta tidak beredar pada sekelompok orang saja, harta jangan beredar hanya pada orang kaya apabila harta terdistribusi dengan baik maka ketimpangan akan menurun dan tidak akan ada lagi jarak antara orang miskin dan orang kaya.

Ada tiga cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yaitu zakat, infak dan shadaqah. Cara pertama yaitu zakat. Zakat dapat menumbuhkan etos kerja. Dengan membayar zakat seseorang akan bekerja dengan baik. Sehingga gerakan sadar zakat pada dasarnya adalah gerakan menciptakan etos kerja yang baik. Negara-negara Muslim dengan sistem wajib zakat (*obligatory basis*), sistem seperti ini diterapkan di Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya dan Malaysia. Negara-negara muslim dengan sistem zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat (*voluntary basis*). Sistem ini antara lain diterapkan antara lain di Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Mesir dan Indonesia. Cara kedua untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yaitu infak.

Infak berasal dari kata anfaqaa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisab maka infak tidak mengenal

nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada delapan ashnaf maka infak boleh diberikan kepada siapapun.<sup>61</sup>

Cara ketiga untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yaitu shadaqah. Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Dalam terminologi syariah, pengertian shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>62</sup>

Jadi infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat dan memiliki tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Yang membedakannya yaitu orang yang menerimanya, zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan shadaqah dan infaq bisa kapan saja dikeluarkan. Tetapi ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sama untuk muzaki (pemberi zakat), munfik

---

<sup>61</sup> Henni Eka, "Analisis Dampak Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest". *Jurnal fakultas ekonomi dan manajemen institute pertanian Bogor*, (2017).

<sup>62</sup> Abdul haris, et. al. "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat". *Jurnal ekonomi bisnis syari'ah al-mawadah warrahmah kolaka*,. Vol.1 No.1 (2018).

(pemberi infaq), dan mushaddiq (pemberi sedekah) maupun mustahiq (penerima ZIS).

## G. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan Disparitas Penapatan sudah ada yang meneliti khususnya pada daerah-daerah yang ada pada Indonesia. Emi Nuraini dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan di Wilayah Gerbang Kertosusila” dengan Metode analisis menggunakan teknik analisis regresi data panel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Gerbangkertosusila.<sup>63</sup>

Darzal dengan judul Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi” Menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini menggunakan data panel, yang merupakan kombinasi antara data *time-series* dan *cross-section* hasil penelitian analisis regresi ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari belanja langsung dan TPAK terhadap pendapatan per kapita.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Nuraini Emi, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan Di Wilayah Gerbangkertosusila”. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 5 No. 1 (2017), h.52-67.

<sup>64</sup> Darzal, “Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah”. Vol. 4 No. 2 (Oktober-Desember 2016).

Kukuh Danuargo Priyambodo dengan judul “Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur”. Menggunakan Analisis kuantitatif yang digunakan berdasarkan empat alat analisis, yaitu tipologi klassen, indeks williamson, indeks entropi theil serta shift share Esteban Marquillas. Berdasarkan dari analisis tipologi klassen, yang membagi daerah menjadi empat kuadran, rata-rata kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur berada pada kuadran IV. Terdapat 23 kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori kuadran ini, daerah merupakan daerah yang relatif tertinggal.<sup>65</sup>

Nur Aidar dengan judul “Analisis Disparitas pendapatan regional di provinsi aceh”. Di dalam penelitian ini model analisis kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan menggunakan Indeks Entropi Theil menggunakan data sekunder dalam bentuk data *time series* Berdasarkan hasil indeks Entropi Theil rata-rata tertinggi terjadi pada wilayah Timur Utara Aceh yaitu sebesar 1,66, diikuti wilayah Tengah Aceh sebesar 1,37 dan terkecil pada wilayah Barat-Selatan Aceh yaitu sebesar 1,25. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada ketiga wilayah Aceh secara umum masih mengalami disparitas.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Kukuh Danuargo, “ Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur”. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume 2 No.1 (2015).

<sup>66</sup> Nur Aidar dengan judul “Analisis Disparitas pendapatan regional di provinsi aceh”. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 5 No. 1 (2017), h.52-67.



## H. Kerangka Pemikiran

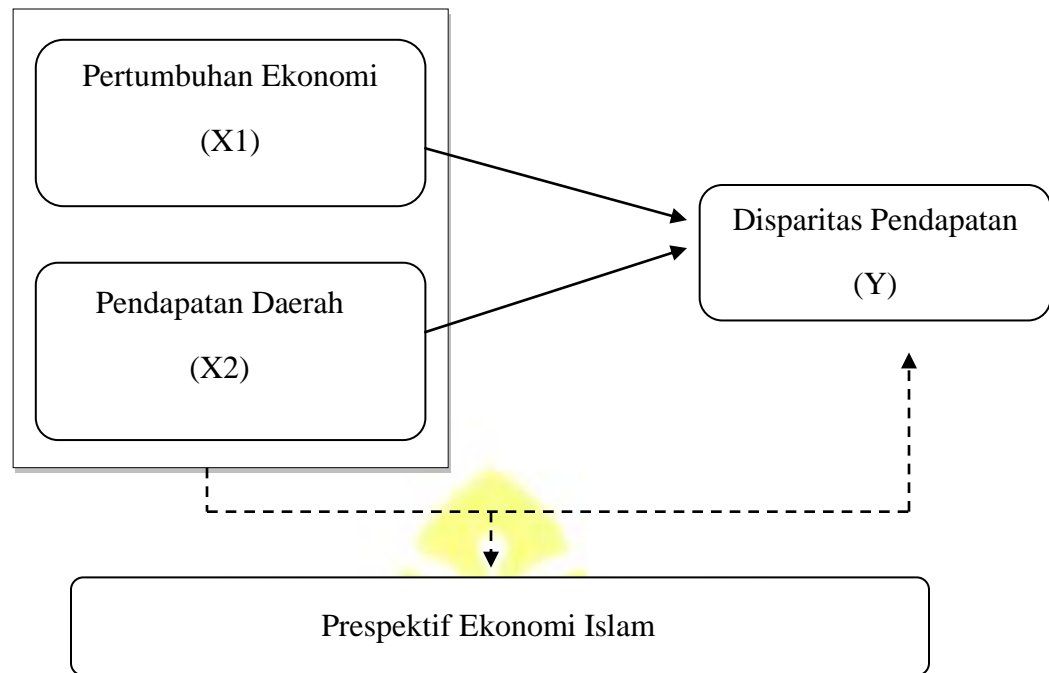
### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan tolak ukur kemajuan perekonomian suatu wilayah apabila output/produksi suatu daerah tersebut setiap tahunnya meningkat maka laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Peningkatan ini di lihat dari lapangan usaha yang ada, semakin tinggi jumlah yang dihasilkan setiap sektornya maka semakin besar nilai nilai produk domestik regional bruto yang dihasilkan. Pada kota Metro sektor lapangan usaha yang paling banyak menyumbang dengan nominal tertinggi adalah sektor perdagang besar dan eceran sedangkan kota Bandar Lampung sektor lapangan usaha yang mendominasi dan tertinggi adalah pada industri pengolahan.

### 2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan daerah. Pendapatan daerah juga berupa hasil yang di dapat dari sektor swasta (rakyat) dan di masukan kedalam kas negara guna sebagai pendapatan daerah.

Dengan demikian kedua variabel tersebut digunakan sebagai variabel X sehingga diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 3  
kerangka pemikiran

**Keterangan :**

- ▶ = berpengaruh Secara Parsial  
 - - - - -▶ = berpengaruh Secara Simultan

## I. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.

## 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Pendapatan

Berdasarkan penelitian Emi Nuraini “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan di Wilayah Gerbang Kertosusila” Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Gerbangkertosusila, Sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Gerbangkertosusila.<sup>67</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Disparitas pendapatan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

$H_{\alpha_1}$ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap disparitas Pendapatan pada kota Metro.

$H_{\alpha_2}$ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap disparitas Pendapatan pada kota Bandar Lampung.

## 2. Pengaruh Pendapatan daerah Terhadap Disparitas Pendapatan

Berdasarkan penelitian Prawidya Hariani “Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara” Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Simultan

---

<sup>67</sup>Nuraini Emi, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan Di Wilayah Gerbangkertosusila”. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 5 No. 1 (2017), h.52-67.

ketimpangan ekonomi (GR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.<sup>68</sup> Berdasarkan penelitian diatas, Pengaruh Pendapatan daerah terhadap Disparitas pendapatan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

$H_{a3}$ : Pendapatan daerah tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Disparitas Pendapatan Kota Metro.

$H_{a4}$ : Pendapatan daerah tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Disparitas Pendapatan Kota Bandar Lampung.



---

<sup>68</sup>Prawidya, "Analisis Ketimpangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

### BAB III

#### METODELOGI PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan ( *library research* ).<sup>69 70</sup>

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku-bukuda data publikasi dari instansi seperti Badan Pusat Statistik, BI dan BPPRD.<sup>71</sup> Penelitian ini juga membandingkan atau penelitian komparatif antara wilayah satu dengan yang lainnya dengan melihat fenomena yang akhir-akhir terjadi.

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode penelitiaan kuantitatif dan kualitatif R&D* ( Bandung : Alfabeta, 2014), h.11.

<sup>70</sup> *Ibid.* h.13.



## **B. Sumber Data**

Dalam usaha untuk mencari kebenaran, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka. Pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang di publikasikan melalui lembaga-lembaga seperti BPS, BPPRD, Jurnal artikel dan publikasi data-data dari instansi terkait lainnya.<sup>72</sup>

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dan informasi penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>73</sup> Metode ini mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti data publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi, data pendapatan daerah publikasi dari BPS dan data Disparitas Pendapatan dari Publikasi Bank Indonesia.

## **D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>74</sup> Populasi yang

---

<sup>72</sup> *Ibid.* h.15.

<sup>73</sup> Koentjoroningrat, *Op.Cit.* h.52..

<sup>74</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Buana Perss, 2015) h.157.

diambil dalam penelitian ini adalah seluruh laporan data pertumbuhan ekonomi di dapat dari badan pusat statistik, laporan data Pendapatan Daerah di dapat dari Dinas pendapatan Daerah dan laporan data indeks gini di dapat dari Bank Indonesia. Sampel merupakan bagian dari poulasi yang memiliki ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel merupakan dapat anggota populasi yang dipilih dengan mengunkan teknik atau metode penentuan sampel tertentu.<sup>75</sup> Sampel dalam penelitian ini yaitu jangka waktu sebelas tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.

#### **E. Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan dua Variabel. Variabel yang pertama pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Daerah merupakan variabel independen. Variabel yang kedua adalah Disparitas pendapatan merupakan variabel dependen.

##### **1. Variabel Terikat ( Variabel dependen ) (Y)**

Variabel terikat atau yang sering disebut dengan variabel output, kriteria konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Penelitian ini variabel terikatnya adalah disparitas pendapatan.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Nanang Martono, *Metode penelitian kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>76</sup> Sugiyono, *Op.Cit.* h.61.

## 2. Variabel Bebas ( Variabel Independen ) (X)

Variabel bebas adalah variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain dan dapat dikatakan juga variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin diketahui. Penelitian ini variabel bebasnya adalah pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Daerah.

Tabel 2  
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Definisi	Skala Pengukuran
Independen (X)	1. Pertumbuhan Ekonomi (X1)	1. Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, kenaikan nilai tambah - ( <i>added value</i> ).	Rasio (Rp)
	2. Pendapatan Daerah (X2)	2. Pendapatan Daerah adalah Jumlah dari pada hasil yang di dapat oleh pemerintah daerah, di antaranya pajak.	Rasio (Rp)
Dependen (Y)	1. Disparitas Pendapatan (Y1)	1. Disparitas pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang signifikan antar daerah satu dengan lainnya dan adanya kesenjangan pendapatan.	Rasio

## **F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Menurut Sugiarto secara umum, permasalahan analisis regresi melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas yang disebut analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya fungsional antara dua buah variabel (X) atau lebih dengan variabel terikat.<sup>77</sup>

Alat uji analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yaitu analisis bentuk dan tingkat hubungan anatar variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Alat uji penelitian ini menggunakan Eviews. Pengujian perlu dilakukan uji, maka ujinya adalah sebagai berikut :

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Agar pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tidak bias, maka dilakukan uji asumsi klasik :

#### **a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk dapat mengetahui bahwa data yang ada terdistribusi normal dan independen. Walaupun normalitas suatu data tidak terlalu penting, tetapi sebaiknya data yang ada berkontribusi normal. Uji normalitas menjadi penting dikarenakan dengan normalnya suatu data maka data tersebut dapat dianggap dapat

---

<sup>77</sup> Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EVIEWS, h. 15.

mewakili populasi, dalam uji normalitas menggunakan uji *Normality Test*.<sup>78</sup>

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas merupakan keadaan dimana ada hubungan linier secara sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Menurut Hair variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi yang lebih kecil dari ( $<0.85$ ). Tujuan dilakukan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik sebaiknya terbebas dari korelasi di antara variabel independen, dalam Multikolinearitas menggunakan uji *correlation*.<sup>79</sup>

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji *White*.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.* h.21.

<sup>79</sup> *Ibid.* h.23.

<sup>80</sup> *Ibid.* h.27.



#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi diantara residual dari pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Tujuan dilakukan uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi, dalam uji Autokorelasi menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlations LM Test*.

#### **e. Uji Regresi Linier Berganda**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variable independen dengan satu variable dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variable independen. Selain itu, uji regresi linear juga berguna untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan menunjukkan arah hubungan variabel dependen dengan variabel independen.<sup>81</sup>

#### **f. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi ini, yaitu dengan

---

<sup>81</sup> Angrita Denziana, Indrayenti, Ferdinan Fatah, "Corporate Financial Performance Effects Of Macro Economic Factors Against Stock Return". *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 5 No. 2 (September 2014).

membandingkan nilai koefisien determinan. Jika  $R^2$  semakin mendekati 1 (satu) maka model semakin tepat. Pada penelitian ini. Koefisien determinasi juga sebuah kunci penting dalam analisis regresi. Nilai koefisien determinasi di interpretasikan sebagai proporsi dari varian variabel dependen, bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar nilai koefisien determinasi tersebut.<sup>82</sup>

## 2. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Parsial (Uji- t)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak
- 2) Jika nilai signifikansi  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima.<sup>83</sup>

### b. Uji Simultan (Uji-F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan dengan

---

<sup>82</sup> Sukestiyarno, *Statistika Dasar* ( Yogyakarta : Andi Offset, 2014 ), h.166.

<sup>83</sup> Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EVIEWS, h. 17.

nilai  $\alpha$  (5 %) pada tingkat derajat 5 %.<sup>84</sup> Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak
- 2) Jika nilai signifikansi  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima.



---

<sup>84</sup> *Ibid.* h.18.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kota Metro**

Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68,74 km<sup>2</sup>, terletak pada bagian tengah Propinsi Lampung. Ibukota Kota Metro adalah Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Topografi Kota Metro berupa daerah dataran aluvial. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 meter sampai 75 meter dari permukaan laut, dan dengan kemiringan 0 % sampai 3 %. Secara astronomis, Kota Metro terletak antara -5° 5' Lintang Selatan dan 5°10' Lintang Selatan dan antara -105° 15'–105° 20' Bujur Timur. Penduduk Kota Metro sebanyak 160.729 jiwa yang terdiri atas 80.300 jiwa penduduk laki-laki dan 80.429 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,84.

Kepadatan penduduk di Kota Metro mencapai 2.338 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Metro Pusat dengan kepadatan sebesar 4.340 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Metro Selatan sebesar 1.054 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu jumlah rumah tangga di Kota Metro sebanyak 40.887 rumah tangga. Berdasarkan posisi geografisnya :

#### **a. Wilayah Adminstratif Kota Metro**

Kota Metro memiliki daerah Adminstratif batas-batas:

- 1) Utara – Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
- 2) Selatan – Kabupaten Lampung Timur
- 3) Barat – Kabupaten Lampung Tengah
- 4) Timur – Kabupaten Lampung Timur.

#### **b. Sejarah Singkat Kota Metro**

Berlakunya pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945 maka Metro menjadi Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati pertama yang menjabat adalah Burhanuddin (1945 – 1948). Sebelum menjadi Kota Administratif Metro, Metro merupakan suatu wilayah kecamatan yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan dan 11 (sebelas) desa. Atas dasar Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Administratif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Metro. Harapan untuk memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah

administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan yang terdiri dari 22 Kelurahan.

## **2. Kota Bandar Lampung**

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20'sampai dengan 5°30'lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105° 37' bujur timur. Ibukota propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

### **a. Wilayah Administratif**

Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.



- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Jumlah penduduk kota Bandar Lampung berjumlah 997.728 jiwa dengan sex ratio 101, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 18.628 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 2.476 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung terdapat 17 buah hotel berbintang, 48 hotel non bintang, 17 pondok wisata, dan 192 rumah makan.

#### **b. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung**

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan Keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undangundang No. 14 tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kota nya Tanjungkarang – Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan. Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-turut.

## **B. Gambaran Hasil Penelitian**

Penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah terhadap disparitas pendapatan di kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan pada penelitian ini data *time series* atau rentang waktu dari 2006 sampai 2016. Alat olah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak ( *Eviews* ) komputer dengan metode analisis regresi linear berganda. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana perkembangan secara umum dari pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan daerah terhadap disparitas pendapatan.

## 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi disuatu wilayah dengan jangka waktu berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besar nya sektor-sektor yang terdapat pada produk domestik regional bruto (PDRB), berikut pertumbuhan ekonomi kota Bandar Lampung dan kota Metro :

**Tabel 3**  
Pertumbuhan ekonomi kota Bandar Lampung dan  
Kota Metro Tahun 2006-2016 (Dalam Persen %)

Tahun	Kota	
	Metro	B.Lampung
2006	6,48	6,30
2007	6,24	6,83
2008	5,21	6,93
2009	5,32	6,01
2010	5,89	6,33
2011	6,40	6,53
2012	6,69	6,65
2013	6,89	6,90
2014	6,13	6,92
2015	5,87	6,33
2016	5,90	6,43

*Sumber data diolah dari BPS kota Bandar Lampung*

Uraian tabel di atas bahwa pertumbuhan yang terjadi antara 2 kota yaitu kota Bandar Lampung dan kota Metro, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi kota Metro lebih besar dibandingkan dengan kota Bandar Lampung yaitu sebesar 6,69%. Pada tahun selanjutnya dari tahun 2013 pertumbuhan

paling besar anatar kedua kota tersebut yaitu kota Bandar Lampung sebesar 6,90%. Pada tahun-tahun berikutnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pertumbuhan ekonomi pada kedua kota tersebut didominasi oleh kota Bandar Lampung yang lebih besar mengalami pertumbuhan ekonomi yaitu 6,92%, 6,33%, 6,43%.

Pada kota Bandar Lampung sendiri pertumbuhan ekonomi pada kota ini mengalami ketidakstabilan dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, tidak jauh berbeda dengan kota metro bahwa pertumbuhan ekonomi pada kota ini mengalami pasang surut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hal lain yang mempengaruhi disparitas pendapatan adalah pendapatan suatu daerah.

## **2. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah juga merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Kesimpulannya bahwa pendapatan daerah adalah pendapatan yang di terima dari perorangan atau instansi yang di ambil oleh pemerintah guna mendapatkan dana pendapatan, yang diantaranya dari

pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### 3. Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan atau sering dikenal dengan ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapat antara satu wilayah dengan wilayah yang lain yang sangat signifikan. Cara melihat suatu daerah timpang atau tidak dapat dilihat dari nominal Indeks Gini ( *Gini ratio*). Ketimpangan tergambar oleh Kurva Lorens dengan prolehan nilai menggunakan indeks gini, indeks gini di dapat dengan cara membagi jumlah pendapatan keseluruhan daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Biasanya akan tergambar apakah daerah tersebut mengalami ketimpangan sedang tinggi ataupun ketimpangan rendah.

### C. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan anatar variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial maupun simultan :

## 1. Hasil Uji Asumsi Klasik Kota Metro

### a. Normalitas

Tabel 4  
Hasil Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi dan  
Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan

Sampel	Jarque-Bera	Probability	Simpulan
11	5,3155	0,0701	Data berdistribusi Normal

*Sumber : Output eviews 9 data diolah 2018*

Hasil output eviews pada tabel diatas menunjukan bahwa hasil *Jarque-Bera* sebesar 5,3155 atau ( $>2$ ) dan nilai *probability* diperoleh sebesar 0,0701 atau ( $>5\%$ ) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### b. Multikolinearitas

Tabel 5  
Hasil Uji Multikolinearitas Pertumbuhan Ekonomi dan  
Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan

	X1	X2
X1	1,0000	-0,3447
X2	-0,3447	1,0000

*Sumber : Output eviews 9 data diolah 2018*

Hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas tampak bahwa variabel X1 (pertumbuhan ekonomi) dan X2 (Pendapatan Daerah) memiliki koefisien -



0,3447 ( $<0,85$ ) maka dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

### c. Autokorelasi

Tabel 6  
Hasil Uji Autokorelasi Pertumbuhan Ekonomi dan  
Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan

Sampel	Variabel	Prob. Chi-Square	Simpulan
11	X1 dan X2	0,4302	Tidak Mengandung Masalah Autokorelasi

Sumber : Output evIEWS 9 data diolah 2018

Hasil output Eviews diatas menunjukan Prob.Chi-Square sebesar 0,4302 atau lebih besar dari 5%. ( $>5\%$ ) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi.

### d. Heterokedastisitas

Tabel 7  
Hasil Uji Heterokedastisitas - White Pertumbuhan Ekonomi dan  
Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan

Sampel	Variabel	Prob. Chi-Square	Simpulan
11	X1 dan X2	0,8344	Tidak Mengandung Masalah Heterokedastisitas

Sumber : Output evIEWS 9 data diolah 2018

Hasil output diatas menunjukan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,8344 atau lebih besar dari 5% ( >5%) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung masalah Heterokedastisitas.

## 2. Analisis regresi Linear Berganda kota Metro

### a. Regresi Linear Berganda

Tabel 8  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	T hitung	Signifikansi
C	0,1522	0,3831	0,7116
Pertumbuhan ekonomi (X1)	0,4898	0,3849	0,0049
Pendapatan Daerah (X2)	0,0292	1,1227	0,2941
R-squared	0,7299		
Signifikansi	0,0053		

Sumber : Output eviws 9 data diolah 2018

Formulasi persamaan regresi berganda dari variabel pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Daerah ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 0,1522 + 0,4898 * X_1 + 0,0292 * X_2$$

Dimana :

a = Konstanta 0,1522

b<sub>1</sub> = 0,4898

X<sub>1</sub> = Pertumbuhan Ekonomi

b<sub>2</sub> = 0,0292

X<sub>2</sub> = Pendapatan Daerah

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 0,1522 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata tingkat Disparitas Pendapatan sebesar 0,152.
- 2) Koefesien regresi Pertumbuhan Ekonomi (X1) yang dihasilkan sebesar 0,4898 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% maka akan diikuti dengan kenaikan Disparitas Pendapatan sebesar 0,4898 %.
- 3) Koefesien regresi Pendapatan Daerah (X2) yang dihasilkan sebesar 0,0292 menyatakan bahwa setiap terjadi pengurangan Pendapatan Daerah sebesar 1%, maka tidak akan diikuti Disparitas Pendapatan sebesar 0,0292 %.

#### b. Hasil Uji Hipotesis

##### 1) Uji t (Parsial)

Variabel X1 (pertumbuhan Ekonomi) memperoleh nilai *coefficient* 0,4898 dan nilai t-statistik sebesar 0,3849 dan nilai prob. 0,0049 (<5%) maka variabel X1(pertumbuhan ekonomi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y(disparitas pendapatan). Variabel X2 (Pendapatan Daerah) memperoleh nilai *coefficient* 0,0292 nilai t-statistik 1,1227 dan nilai prob. 0,2941 (>5%) maka variabel X2 (Pendapatan Daerah) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap varibel Y (disparitas pendapatan).

## 2) Uji F (Serempak)

Nilai Prob.F statistic sebesar 0,0053 ( $<5\%$ ) maka secara bersama-sama / serempak variabel X1(pertumbuhan ekonomi) dan X2(Pendapatan Daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y(disparitas pendapatan).

## 3) Koefisien Determinasi

Nilai R-squared 0,7299 (72,99%) berarti variabel X1(pertumbuhan ekonomi) dan X2(Pendapatan Daerah) mempengaruhi variabel Y(disparitas pendapatan) sebesar (72,99%) sisanya 27,01% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

## 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Kota Bandar Lampung

### a. Normalitas

Tabel 9  
Hasil Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi dan  
Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan

Sampel	Jarque-Bera	Probability	Simpulan
11	0,9461	0,6230	Data berdistribusi Normal

Sumber : Output eviews 9 data diolah 2018

Hasil output eviews pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil *Jarque-Bera* sebesar 0,9461 atau ( $<2$ ) dan nilai *probability* diperoleh sebesar 0,6230 atau ( $>5\%$ ) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## b. Multikolinieritas

Tabel 10  
Hasil Uji Multikolinearitas Pertumbuhan Ekonomi dan  
Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan

	X1	X2
X1	1,0000	0,2825
X2	0,2825	1,0000

Sumber : Output evIEWS 9 data diolah 2018

Hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas tampak bahwa variabel X1 (pertumbuhan ekonomi) dan X2 (Pendapatan Daerah) memiliki koefisien 0,2825 ( $<0,85$ ) maka dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

## c. Autokorelasi

Tabel 11  
Hasil Uji Autokorelasi Pertumbuhan Ekonomi dan  
Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan

Sampel	Variabel	Prob. Chi-Square	Simpulan
11	X1 dan X2	0,2876	Tidak Mengandung Masalah Autokorelasi

Sumber : Output evIEWS 9 data diolah 2018

Hasil output EvIEWS diatas menunjukkan Prob.Chi-Square sebesar 0,2876 atau lebih besar dari 5%. ( $>5\%$ ) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi.

#### d. Heterokedastisitas

Tabel 12  
Hasil Uji Heterokedastisitas - *White* Pertumbuhan Ekonomi dan  
Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan

Sampel	Variabel	Prob. Chi-Square	Simpulan
11	X1 dan X2	0,2583	Tidak Mengandung Masalah Heterokedastisitas

Sumber : *Output eviews 9 data diolah 2018*

Hasil output diatas menunjukkan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,2583 atau lebih besar dari ( >5% ) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung masalah Heterokedastisitas.

#### 4. Analisis regresi Linear Berganda kota Bandar Lampung

##### a. Regresi Linear Berganda

Tabel 13  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	T hitung	Signifikansi
C	0,7638	10,4786	0,0000
Pertumbuhan ekonomi (X1)	0,0844	3,0237	0,0165
Pendapatan Daerah (X2)	0,0066	0,4058	0,6955
R-squared	0,5760		
Signifikansi	0,0323		

Sumber : *Output eviews 9 data diolah 2018*



Formulasi persamaan regresi berganda dari variabel pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Daerah ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 0,7638 + 0,0844 * X_1 + 0,0066 * X_2$$

Dimana :

a = Konstanta **0,7638**

b<sub>1</sub> = **0,0844**

X<sub>1</sub> = Pertumbuhan Ekonomi

b<sub>2</sub> = **0,0066**

X<sub>2</sub> = Pendapatan Daerah

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 0,7638 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata tingkat Disparitas Pendapatan sebesar 0,763.
- 2) Koefesien regresi Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>1</sub>) yang dihasilkan sebesar 0,0844 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% maka akan diikuti dengan kenaikan Disparitas Pendapatan sebesar 0,0844%.
- 3) Koefesien regresi Pendapatan Daerah (X<sub>2</sub>) yang dihasilkan sebesar 0,0066 menyatakan bahwa setiap terjadi pengurangan Pendapatan Daerah sebesar 1%, maka tidak akan diikuti Disparitas Pendapatan sebesar 0,0066%.

## **b. Hasil Uji Hipotesis**

### **1) Uji t (Parsial)**

Variabel X1 (pertumbuhan Ekonomi) memperoleh nilai *coefficient* 0,0844 dan nilai t-statistik sebesar 3,0237 dan nilai prob. 0,0165 ( $<5\%$ ) maka variabel X1(pertumbuhan ekonomi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y(disparitas pendapatan). Variabel X2 (Pendapatan Daerah) memperoleh nilai *coefficient* 0,0066 nilai t-statistik 0,4058 dan nilai prob. 0,6955 ( $>5\%$ ) maka variabel X2 (Pendapatan Daerah) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (disparitas pendapatan).

### **2) Uji F (Serempak)**

Nilai Prob.F statistik sebesar 0.0323 ( $<5\%$ ) maka secara bersama-sama/ serempak variabel X1(pertumbuhan ekonomi) dan X2(Pendapatan Daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y(disparitas pendapatan).

### **3) Koefisien Determinasi**

Nilai R-square 0,5760 berarti variabel X1(pertumbuhan ekonomi) dan X2(Pendapatan Daerah) mempengaruhi variabel Y(disparitas pendapatan) sebesar (57,60%) sisanya 42,40% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan**

Pengaruh secara simultan merupakan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, secara Parsial merupakan pengaruh variabel independen secara masing-masing terhadap variabel dependen. Periode tahun 2006-2016 akan diuraikan sebagai berikut :

Pada Kota Metro Pengaruh secara simultan merupakan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat pengaruh variabel Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Daerah secara serentak dan bersama-sama terhadap Disparitas Pendapatan, Dari hasil analisis regresi berganda, variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan menunjukkan hasil Nilai Prob. F statistik sebesar 0,0053 ( $<5\%$ ) maka secara bersama-sama/serempak variabel X1 (Pertumbuhan Ekonomi) dan X2 (Pendapatan Daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Disparitas Pendapatan). Selanjutnya dari analisis regresi berganda diperoleh nilai R Nilai R- square 0,7299 (72,99%) berarti variabel X1 (Pertumbuhan Ekonomi) dan X2 (Pendapatan Daerah) mempengaruhi variabel Y, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pada Kota Bandar Lampung Pengaruh secara simultan merupakan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat pengaruh variabel Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Daerah secara serentak dan bersama-sama terhadap Disparitas Pendapatan. Dari hasil analisis regresi berganda, variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan menunjukkan hasil Nilai Prob. F statistik sebesar 0,0323 ( $<5\%$ ) maka secara bersama-sama/serempak variabel X1 (Pertumbuhan Ekonomi) dan X2 (Pendapatan Daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Disparitas Pendapatan). Selanjutnya dari analisis regresi berganda diperoleh nilai R Nilai R- square 0,5760 (57,60%) berarti variabel X1 (Pertumbuhan Ekonomi) dan X2 (Pendapatan Daerah) mempengaruhi variabel Y sebesar 57,60 %, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pada Kota Metro Hasil Analisis Regresi secara parsial menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi memperoleh signifikansi 0,0049 lebih kecil bila dibandingkan dengan  $\alpha = 0,05$  hal ini berarti bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Disparitas Pendapatan(Y). Koefisien regresi  $\beta$  sebesar 0,4898 dengan tanda positif menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi Disparitas Pendapatan. Hal ini karena jumlah

Pertumbuhan Ekonomi terus mengalami peningkatan 2 Tahunnya terakhir, terlihat dari tabel Pertumbuhan ekonomi di atas.

Pada Kota Bandar Lampung Hasil Analisis Regresi secara parsial menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi memperoleh signifikansi 0,0165 lebih kecil bila dibandingkan dengan  $\alpha = 0,05$  hal ini berarti bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Disparitas Pendapatan (Y). Koefisien regresi  $\beta$  sebesar 0,0844 dengan tanda positif menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi disparitas pendapatan. Hal ini karena jumlah Pertumbuhan Ekonomi terus mengalami peningkatan 2 Tahunnya terakhir, terlihat dari tabel Pertumbuhan ekonomi diatas.

Hasil yang searah dengan penelitian Wildan Arfianto dan Imam Setiono<sup>85</sup> yang menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan adalah positif dan signifikan. Ini dikarenakan meningkatnya pendapatan domestik bruto pada tahun ke tahun, perekonomian nasional dan pertumbuhan serta berkelanjutan. Teori yang sejalan dengan penelitian ini dikemukakan oleh George H. Bort Menurutnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya, Sedangkan kegiatan produksi pada suatu

---

<sup>85</sup> Wildan Arifianto, Imam Setiyono, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol.1 No.1 (2015), h.2.

daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Pada pertumbuhan ekonomi dalam PDRB memiliki lapangan usaha pada kota Metro haruslah meningkatkan hasil pada pedagang besar dan eceran dan pada kota Bandar Lampung haruslah meningkatkan hasil pada industri pengolahan, mengingat dari kedua kota bahwa lapangan usaha yang ada merupakan keunggulan komparatif.

Pada Kota Metro Hasil Analisis Regresi secara parsial menyatakan bahwa Pendapatan Daerah memperoleh signifikansi 0,2941 lebih besar bila dibandingkan dengan  $\alpha = 0,05$  hal ini berarti bahwa variabel Pendapatan Daerah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan ( $Y$ ). Koefisien regresi  $\beta$  sebesar 0,0292 menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan Pendapatan Daerah tidak akan mempengaruhi Disparitas Pendapatan. Hal ini karena Pendapatan Daerah tidak langsung berdampak pada Disparitas Pendapatan.

Pada Kota Bandar Lampung Hasil Analisis Regresi secara parsial menyatakan bahwa Pendapatan Daerah memperoleh signifikansi 0,6955 lebih besar bila dibandingkan dengan  $\alpha = 0,05$  hal ini berarti bahwa variabel Pendapatan Daerah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan ( $Y$ ). Koefisien regresi  $\beta$  sebesar 0,0066 menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan Pendapatan Daerah tidak akan mempengaruhi Disparitas



Pendapatan. Hal ini karena Pendapatan Daerah tidak langsung berdampak pada disparitas pendapatan.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim yang menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dalam berbagai sumber pada periode tahun anggaran bersangkutan. Pada kenyataannya pendapatan daerah kurang memaksimalkan dari hasil retribusi daerahnya, pada kota Metro retribusi mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 kemudian pada kota Bandar Lampung juga dilihat dari retribusinya yang mengalami ketidakstabilan ditunjukkan pada tahun 2013 dan 2014 yang mengalami penurunan

## **2. Disparitas Pendapatan di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**

Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan tingkat ketimpangan pendapatan, jika tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pertumbuhan penduduk yang melebihi pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Berbicara mengenai disparitas pendapatan maka yang akan dikaji adalah pendapatan perkapita. Berikut tabel pendapatan perkapita kota metro dan kota Bandar lampung :

Tabel 14  
Pendapatan Perkapita Kota Metro dan Kota B.Lampung  
Dalam (Ribu Rp) 2012-2016

TAHUN	KOTA	
	METRO	B.LAMPUNG
2012	21.118,46	30.063,50
2013	23.013,79	32.770,59
2014	25.639,52	36.771,14
2015	28.014,60	40.262,89
2016	31.092,90	44.843,79

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel di atas merupakan tabel PDRB perkapita kabupaten/kota dalam ribuan rupiah dilihat dari tabel diatas bahwa kota Metro pada tahun 2012 – 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan sama halnya kota metro, kota Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami kenaikan dibuktikan dari tabel di atas. Pada disparitas/ketimpangan maka Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Dengan adanya pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakat maka diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan antara *”the have”* dan *”the have not”*.<sup>86</sup> Salah satu ayat yang menjelaskan bahwa harta tidak boleh menumpuk pada segolongan orang saja yaitu Q.S Al-Hasyr ayat 7, berikut :

---

<sup>86</sup>Anita Rahmawaty, “Distribusi dalam ekonomi islam upaya pemerataan kesejahteraan melalui keadilan distributive”. Volume 1, No.1, Juni 2013.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya ( Al-Hasyr ayat 7 ).

Ayat di atas berbicara mengenai harta itu terdistribusi haruslah dengan distribusi yang adil maksudnya adalah bahwa harta tidak beredar pada sekelompok orang saja, harta jangan beredar hanya pada orang kaya apabila harta terdistribusi dengan baik maka ketimpangan akan menurun dan tidak akan ada lagi jarak antara orang miskin dan orang kaya. Dengan adanya pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakatmak, infak dan shodqoh diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan, berikut cara-cara mengatasi disparitas pendapatan :

#### **a. Zakat**

Cara pertama untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan tersebut adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran. Zakat dapat menumbuhkan etos kerja. Dengan

membayar zakat seseorang akan bekerja dengan baik. Sehingga gerakan sadar zakat pada dasarnya adalah gerakan menciptakan etos kerja yang baik. Negara-negara Muslim dengan sistem wajib zakat (*obligatory basis*), sistem seperti ini diterapkan di Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya dan Malaysia. Negara-negara muslim dengan sistem zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat (*voluntary basis*). Sistem ini antara lain diterapkan antara lain di Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Mesir dan Indonesia.

Zakat adalah solusi dari disparitas pendapatan, zakat yang diterima akan didistribusikan kepada wilayah yang membutuhkan. Apabila suatu wilayah tidak terdapat penerimaan zakat tersebut maka akan di transfer ke wilayah yang lainnya sehingga mengurangi ketimpangan. Berikut ayat yang berkaitan dengan zakat , surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الْزِقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan bahwa penerima zakat disebut Mustahik, mustahik memiliki 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir. Miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Zakat sebagai dana bantuan sosial sangat besar peran dan manfaatnya dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi mustahik. Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para mustahik sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT dalam suat At-taubah ayat 6 di atas.<sup>87</sup>

#### **b. Infak**

Infak berasal dari kata anfaqaa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisab maka infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada delapan ashnaf maka infak boleh diberikan kepada siapapun.<sup>88</sup>

Jadi dari penjelasan infaq di atas bahwa menginfakkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketaqwaan manusia

---

<sup>87</sup> Taufik Chaidir, "Kemanfaatan Dana Zakat Bagi Mustahik, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataramal Masraf ". *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* Volume 2 Nomor 2 (Juli -Desember 2017).

<sup>88</sup> Henni Eka, "Analisis Dampak Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest". *Jurnal fakultas ekonomi dan manajemen institute pertanian Bogor*, (2017).

kepada Allah SWT. Infak yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial, yang tidak terikat jumlah dan waktunya. Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat, melainkan infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

### c. Shadaqah

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Dalam terminologi syariah, pengertian shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>89</sup>

sedekah itu berarti menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kaum fuqara wal masakin atau orang yang berhak mendapatkannya dengan hati yang ikhlas dan mengharap dari ridha Allah. Pemberian kepada orang lain, baik bersifat materi maupun nonmateri secara sukarela, tanpa nisab, dan bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun, serta kepada siapa pun tanpa aturan dan syarat, kecuali untuk mengharapkan ridho Allah.<sup>90</sup>

Jadi infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat dan memiliki tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu berbagi

---

<sup>89</sup>Abdul haris, et. al. "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat". *Jurnal ekonomi bisnis syari'ah al-mawadah warrahmah kolaka*,. Vol.1 No.1 (2018).

<sup>90</sup>Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah* (Jakarta : Qultum Media, 2007), h.5.



kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Yang membedakannya yaitu orang yang menerimanya, zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan shadaqah dan infaq bisa kapan saja dikeluarkan. Tetapi ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sama untuk muzaki (pemberi zakat), munfik (pemberi infaq), dan mushaddiq (pemberi sedekah) maupun mustahiq (penerima ZIS).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari Hasil Penelitian ini dengan Judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan di Tinjau Dari Perpektif Ekonomi Islam ( Studi Pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2016), Sebagai berikut :

1. Hasil uji menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap disparitas pendapatan pada kota Metro. Pada uji parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, sedangkan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan. Hasil uji menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan pada kota Bandar Lampung. Pada uji parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, Sedangkan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan.
2. Dengan adanya pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakat, infak dan shadaqah maka diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan. Zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah kepada siapa saja yang

membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan shadaqah dan infaq bisa kapan saja dikeluarkan

## **B. Saran**

Adapun pokok fikiran yang dapat dijadikan saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, untuk kota Bandar lampung dan kota Metro perlu adanya peningkatan yang *continue* pada produk domestik reginal bruto (PDRB) sehingga akan meningkatkan persentase pertumbuhan ekonomi. Semakin besar hasil PDRB maka semakin besar pula pendapatan daerah yang didapat.
2. Bagi Bamasyarakat, pertumbuhan ekonomi pastilah berkembang apabila output atau barang yang dihasilkan oleh manusia terus menerus mengalami kemajuan, oleh karena itu setiap orang hasruslah bekerja produktif dan memiliki etos kerja yang baik.
3. Bagi penelitian-penelitian lainnya dapat melakukan tindak lanjut penelitian khususnya menambah variabel yang dapat mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Lampung, Seperti kemiskinan dan juga membandingkan ketimpangan pendapatan antara kabupaten kota.
4. Bagi Universitas lebih meningkatkan mahasiswa ke pada nilai-nilai islami dan juga memberikan pelatihan sesuai dengan jurusan yang ditempuh.